

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Amirudin, Zainal, A. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang : Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Harahap Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Sinar Grafika.
- Lamintang, PAF. 1997. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, PM. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Moeljanto. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljanto. 2013. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nitibaskara, Ronny Rahman. 2000. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soemitro, RH. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramitha.

Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Wiradipadja, Saefullah. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung : Keni Media.

Wiyono, R. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Ferdian, Ardi. 2012. *Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi*. *Arena Hukum*. 6(3) : 163.

Latifah, Marfuatul. 2010. “*Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”. *Negara Hukum*. 1(1) : 17.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).

Undang-undang Nomor 21 tahun 2001, Tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, Tentang perubahan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Internet

Nofwan, Razif. 2018. “*Azas Pembuktian Terbalik Bagi Tindak Pidana Korupsi*”, Razif Nofwan Law Firm, <https://www.rnplawfirm.com/azaz-pembuktian-terbalik/> , Diakses Pada 17 Februari 2019, Pukul 22.00 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dwi Kuncoro, Selaku Penitera di Pengadilan Negeri Denpasar, Wawancara dilakukan pada hari Rabu 10 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Ester Oktavi, Selaku Hakim di Pengadilan TIPIKOR Denpasar, Wawancara dilakukan pada hari Rabu 10 April 2019.

Wawancara dengan Bapak Subyantoro, Selaku Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Wawancara dilakukan pada hari Rabu 11 April 2019